



# Civil Decision Enforcement System In Indonesia: Obstacles & Solutions

**Prospect of Economic Law  
Reform to Prepare the Post-  
Pandemic Economic Recovery:  
Session 2”**

**INLU 2022**



## Dr. Ridwan Mansyur, S.H, M.H.

- Registrar of the Supreme Court of Indonesia
- Head of the Technical Team of the Working Group For “Pedoman Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”



An aerial photograph of a city, likely New York City, showing a dense urban landscape with numerous skyscrapers and a river. Overlaid on the image is a large, white, zigzag graphic that resembles a stylized mountain range or a series of peaks and valleys. The graphic is semi-transparent, allowing the city buildings to be seen through it. The overall color palette is warm, with a golden-brown tint, suggesting a sunrise or sunset. The text is positioned on the left side of the image, within the white zigzag graphic.

**Sekilas Pengaturan  
Eksekusi  
di Indonesia**

# Dasar Hukum

## Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Peradilan  
Umum dan Undang-  
Undang Peradilan Agama

Peraturan Perundang-  
Undangan Lain yang  
terkait



SEMA dan SK KMA

SK Dirjen Badilum

# Para Pihak dalam Eksekusi

## **Ketua Pengadilan Negeri/Agama**

Memimpin jalannya eksekusi .



## **Panitera atau Juru Sita**

melaksanakan Eksekusi



## **Pemohon Eksekusi**

pihak yang menang dan berhak mendapatkan pemenuhan hak .



## **Termohon Eksekusi**

pihak yang kalah dan berkewajiban memberikan pemenuhan hak





# Asas-Asas Eksekusi

01

## Eksekusi atas Perintah Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

- Atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- Jika objek eksekusi terletak di wilayah hukum Pengadilan tersebut maka melimpahkan Eksekusi secara delegasi kepada Pengadilan tempat Objek Eksekusi

02

## Putusan yang bersifat kondemnatoir

- hanya putusan yang amar atau diktumnya mengandung penghukuman terhadap diri Tergugat



# Asas-Asas Eksekusi

03

## Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

- Putusan Perdata yang BHT
- Hubungan antara para pihak telah pasti

04

## Putusan tidak dijalankan secara sukarela

- Merupakan upaya paksa
- Berdasarakan permohonan
- biaya eksekusi ditanggung Tereksekusi

# Pengecualian Asas Eksekusi



Terdapat  
beberapa  
Pengecualian  
dalam  
Eksekusi

## Akta yang disamakan dengan Putusan BHT

- Grosse akta pengakuan utang
- Sertifikat Hak Tanggungan
- Sertifikat Jaminan Fidusia

## Putusan Serta merta

- Berdasrakan permohonan
- Memenuhi persyaratan yang limitative
- Jaminian dari Penggugat
- Persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tinggi Agama

## Putusan Provisional

Ketentuan hampr sama dengan Putusan serta merta



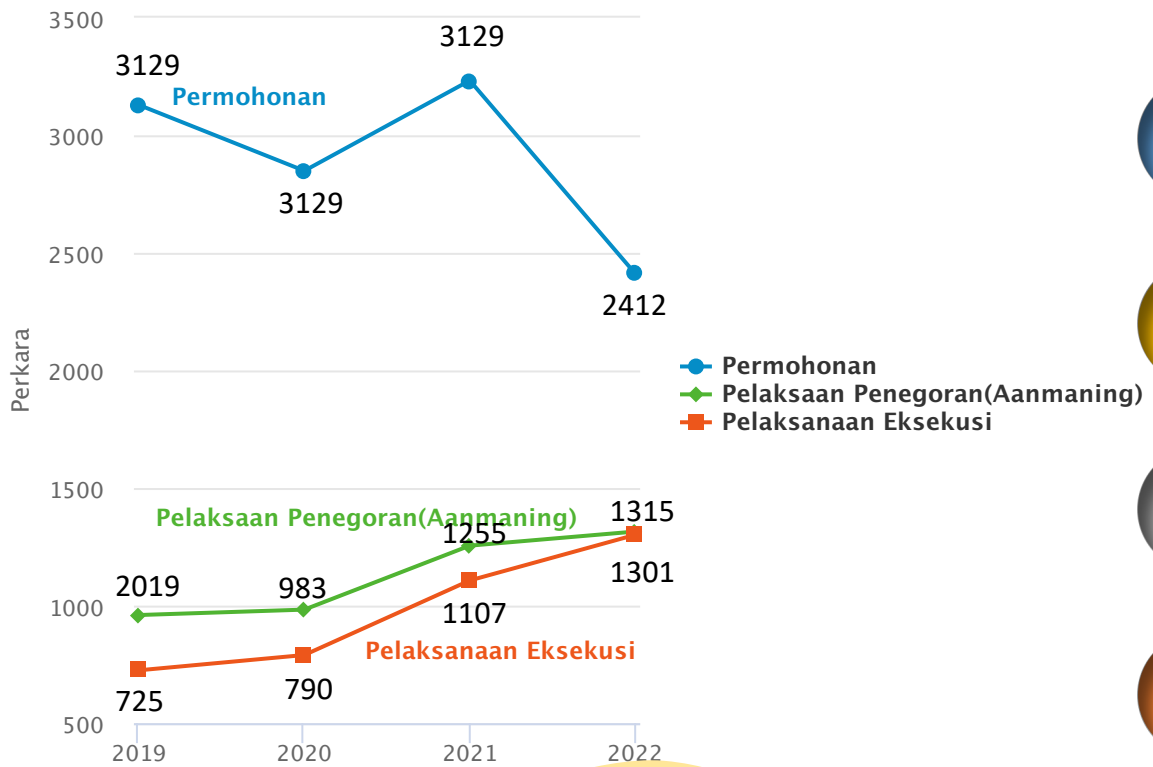
# Jenis Eksekusi

## Eksekusi Riil

- Menyerahkan Suatu Barang;
- Pengosongan Sebidang Tanah Atau Rumah;
- Membongkar Suatu Bangunan
- Melakukan Suatu Perbuatan Tertentu
- Penghentian Suatu Perbuatan Atau Keadaan

## Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

## Jumlah Permohonan, Aanmaning dan Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2019-2022



## 5 Jenis Eksekusi Terbanyak Tahun 2002



**Perbuatan Melawan Hukum**  
Sejumlah 416.



**Wanprestasi**  
Sejumlah 322



**Perselisihan Pemutusan Hubungan**  
Sejumlah 259



**Perbuatan Melawan Hukum**  
Sejumlah 149



**Objek Sengketa Tanah**  
Sejumlah 100

## Permohonan Eksekusi Terbanyak

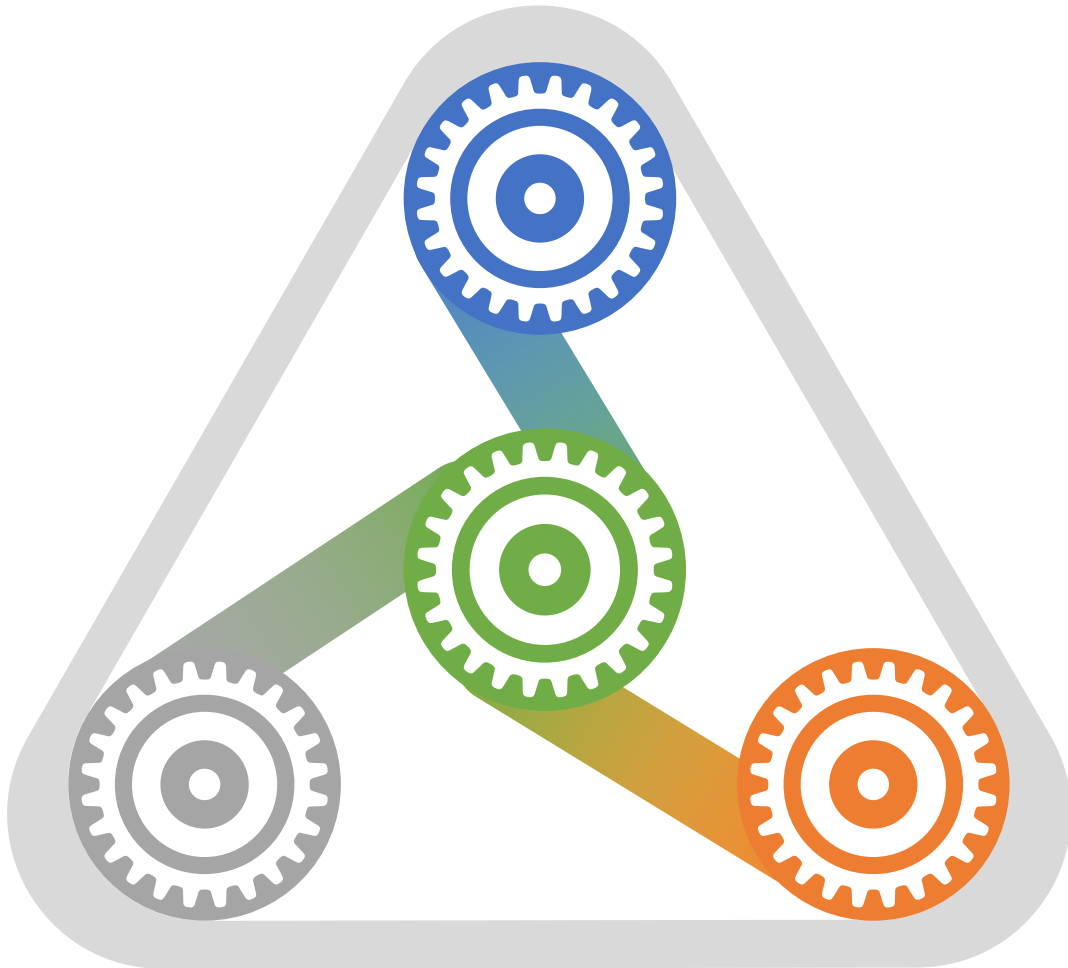


An aerial photograph of a city, likely New York City, showing a dense urban landscape with numerous skyscrapers and a river. Overlaid on the image is a large, white, zigzag graphic that resembles a mountain range or a stylized path. The graphic is semi-transparent, allowing the city buildings to be seen through it. The overall color palette is warm, with a golden-orange hue, suggesting a sunrise or sunset. The text 'Hambatan dan Solusi Eksekusi' is written in a bold, orange font on the left side of the image.

# Hambatan dan Solusi Eksekusi



# Permasalahan Eksekusi Perdata Indonesia



## Permasalahan Yuridis

Permasalahan mengenai peraturan perundangan-perundangan terkait eksekusi

## Permasalahan Eksternal

Permasalahan yang terjadi karena faktor instansi/lembaga lain baik kurangnya kerjasama atau ketentuan yang dikeluarkan instansi/lembaga lain

## Permasalahan Internal

Permasalahan yang terjadi dalam lingkungan peradilan baik karena sistem maupun praktek peradilan

# Permasalahan Yuridis

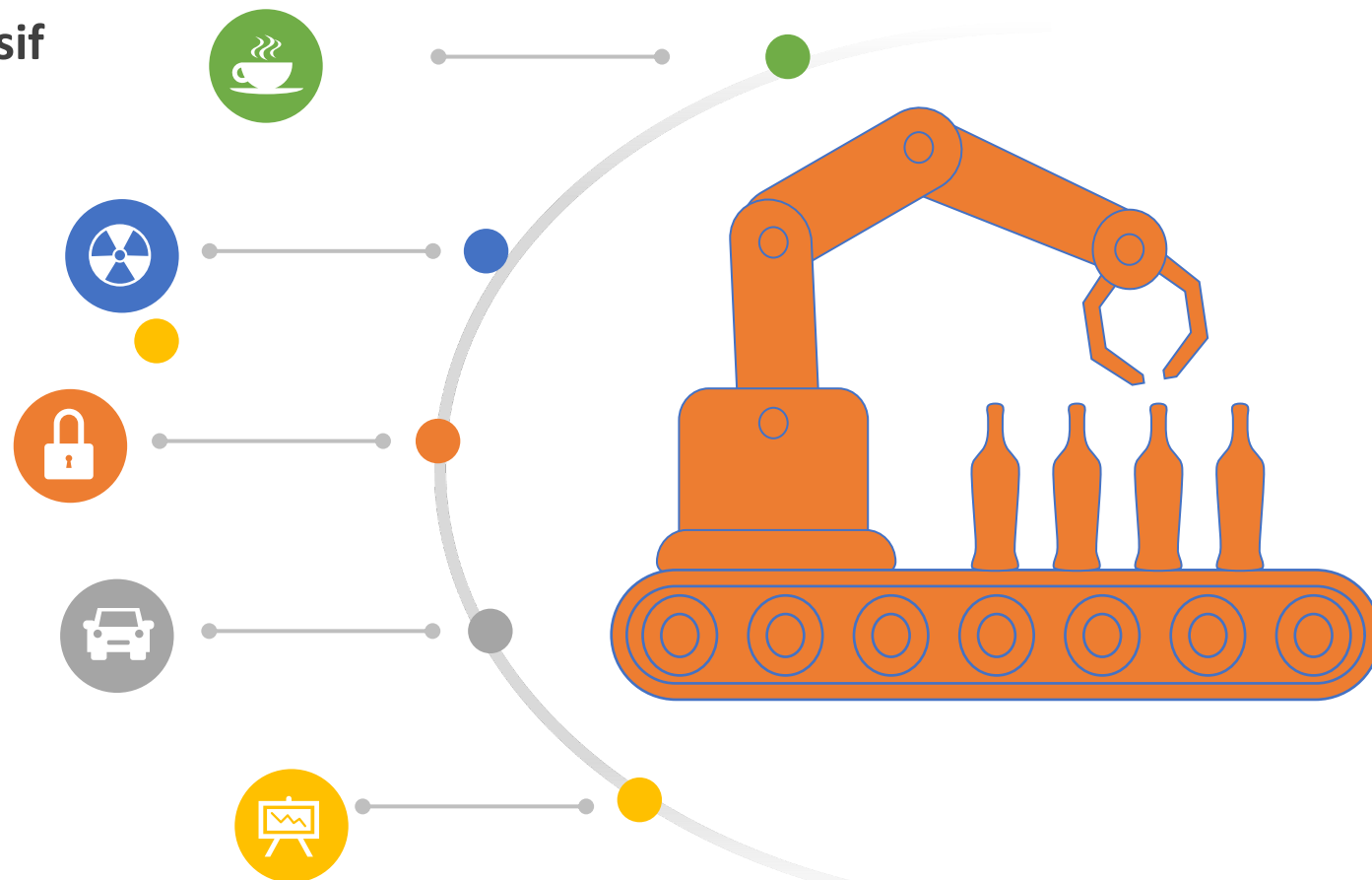
Belum adanya Pengaturan mengenai eksekusi perdata secara komprehensif baik

Peraturan Teknis yang dikeluarkan Lembaga Lain kadangkala menghambat eksekusi

Dibutuhkan peraturan yang mensupport jalannya eksekusi dengan Tertib

Putusan Non-executable

Berbagai Upaya Hukum



# Permasalahan Internal

**Kompetensi, Pengalaman dan Keberanian Ketua Pengadilan**



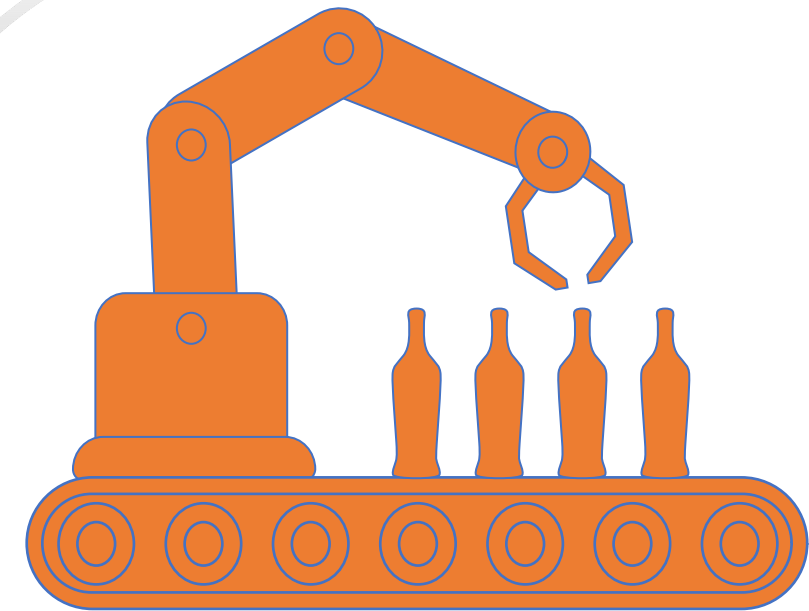
**Lemahnya Kompetensi Juru Sita**



**Rendahnya Kuantitas Juru Sita**



**Belum tersedia unit kerja pada MA yang bertugas untuk kebijakan dan Evaluasi Eksekusi**





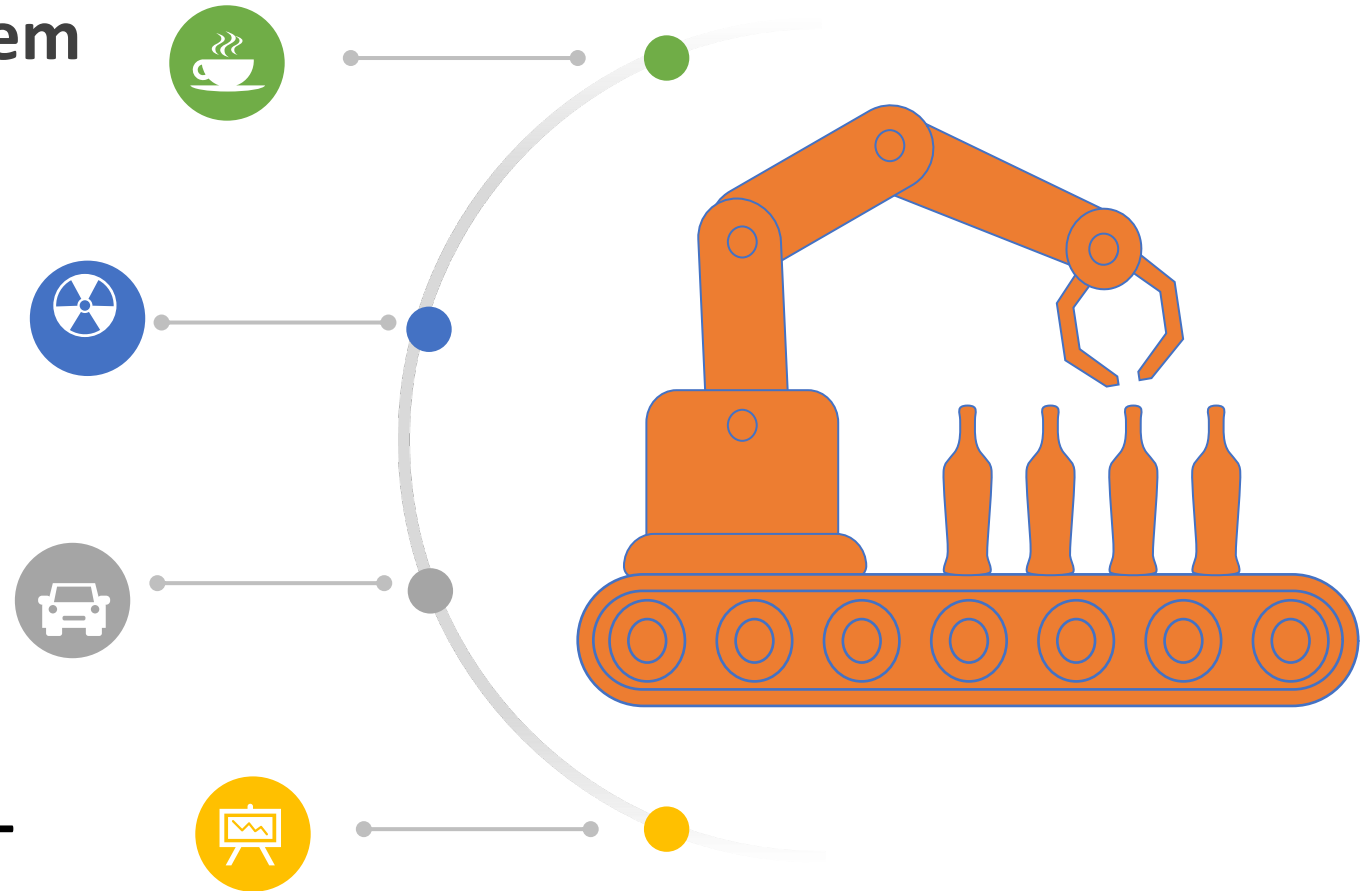
# Permasalahan Eksternal

**Belum tersedianya ekosistem kelembagaan pelaksanaan eksekusi**

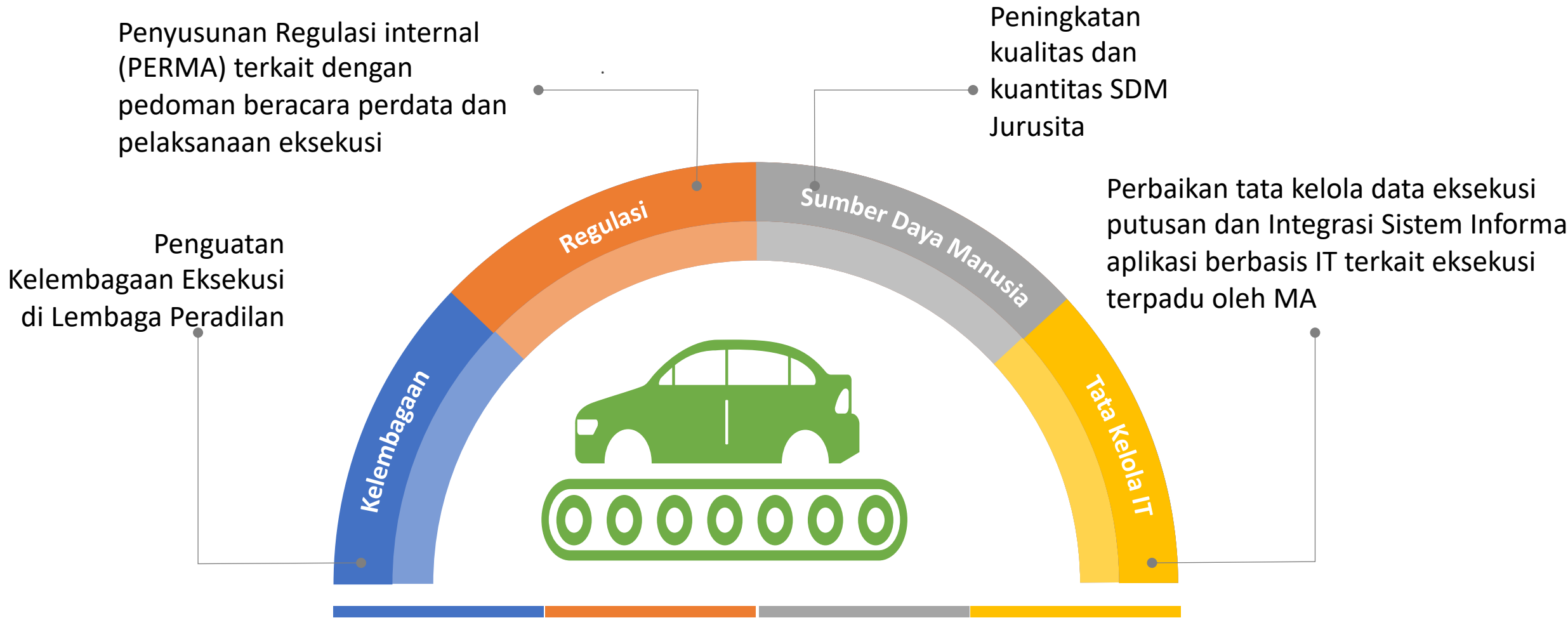
**Kurangnya Koordinasi Keamanan**

**Kurangnya Dukungan Data/Informasi**

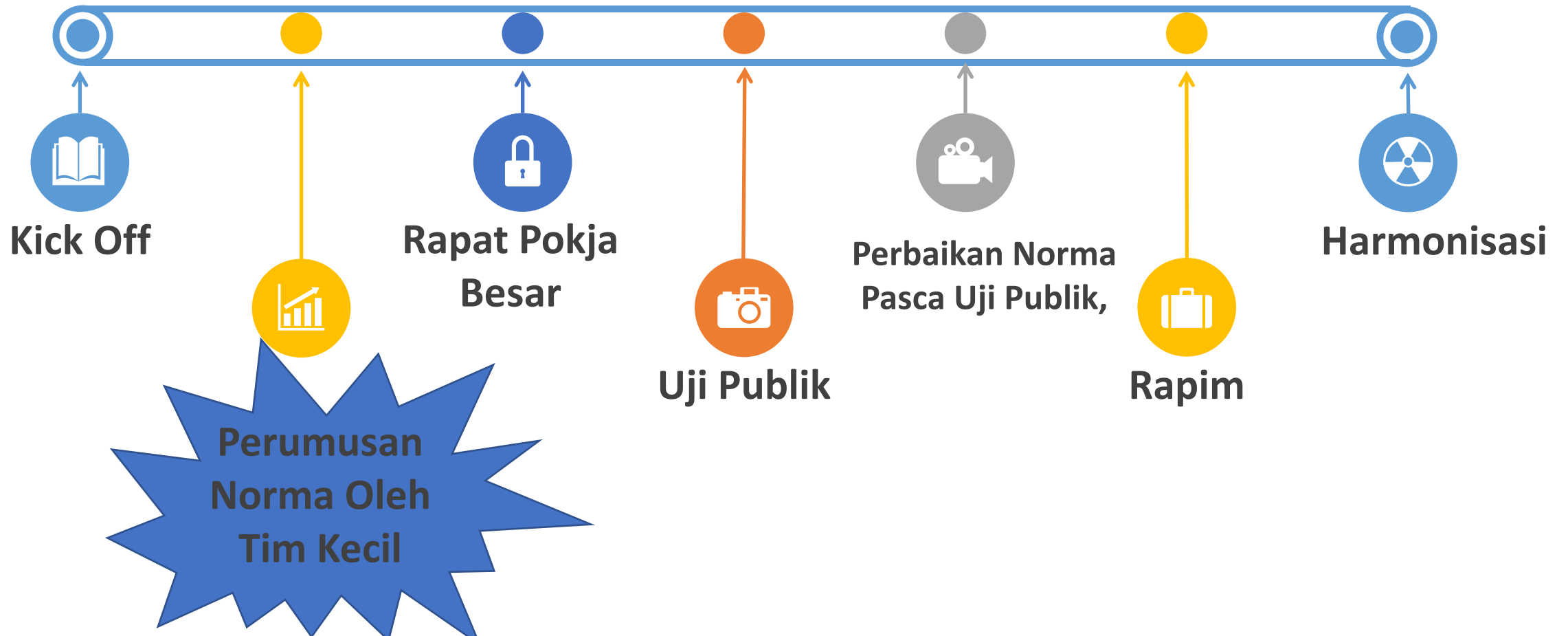
**Kurangnya Koordinasi antar K/L dalam menjalankan Eksekusi**



# Pemetaan Langkah Mahkamah Agung



# Timeline Rancangan Perma





# Kebutuhan Dukungan

## Dukungan Perundang-Undangan

1. Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata
2. Peraturan Teknis terkait Eksekusi
3. Peraturan Terkait Yang mendukung Terlaksananya eksekusi dengan baikl

## Dukungan Keamanan

Penguatan dukungan aparat keamanan dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan


## Dukungan Data dan Informasi

1. Pengembangan database perkara perdata yang terkoneksi
2. Pengembangan sistem informasi layanan keperdataan (Badan Usaha, Jaminan Benda Bergerak dan Kepailitan)

## Dukungan dalam Pelaksanaan Eksekusi

Dukungan pelaksanaan eksekusi dari K/L terkait lainnya)





**Hambatan dan Solusi  
Eksekusi Putusan  
Perkara Cerai  
Terkait Nafkah Istri  
dan Anak**

# Kompleksitas Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Cerai Terkait Nafkah Istri dan Anak



## Pra Permohonan Perkara Cerai

- Minim Informasi dan Pendampingan oleh Kuasa Hukum
- Materi gugatan hanya sebatas perceraian semata, tidak memuat akibat perceraian termasuk hak asuh dan nafkah anak
- Inferior Posisi Perempuan dalam kultur masyarakat

## Penanganan Perkara cerai

- Kompetensi Hakim dalam mediasi
- Putusan Perceraian sering tidak tegas mencatumkan hak pemeliharaan anak
- Belum didukung pedoman dalam menentukan nafkah anak
- Belum ada mekanisme pendampingan anak

## Eksekusi Perkara Cerai terkait Nafkah Istri dan Anak

- Kekosongan hukum dalam hal perlindungan nafkah bagi istri dan anak pasca putusan cerai, khususnya untuk yang bekerja di sektor swasta/informal atau pengangguran
- Proses eksekusi seringkali menuntut biaya tinggi dan tidak sepadan dengan nominal putusan yang hendak di eksekusi
- Pihak yang kalah (baik Ayah/Ibu) tidak menyerahkan anak
- Ayah sebagai pihak yang diwajibkan memenuhi nafkah anak, mangkir dari kewajibannya
- Persoalan dalam skema tunjangan pemeliharaan anak atau bantuan khusus pasca perceraian
- Belum ada lembaga yang khusus mengurus pemeliharaan anak atau eksekusi pasca perceraian

# Strategi Solusi Eksekusi Putusan Perkara Cerai Terkait Nafkah Istri dan Anak

## Pra Permohonan Perkara Cerai



Memperkuat kebijakan/pedoman/regulasi terkait dengan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak dalam perkara perceraian

1. Format standar gugatan perkara cerai
2. Edukasi kepada masyarakat khususnya perempuan
3. Peningkatan layanan posyankum
4. Pemberian edukasi kepada OBH maupun advokat

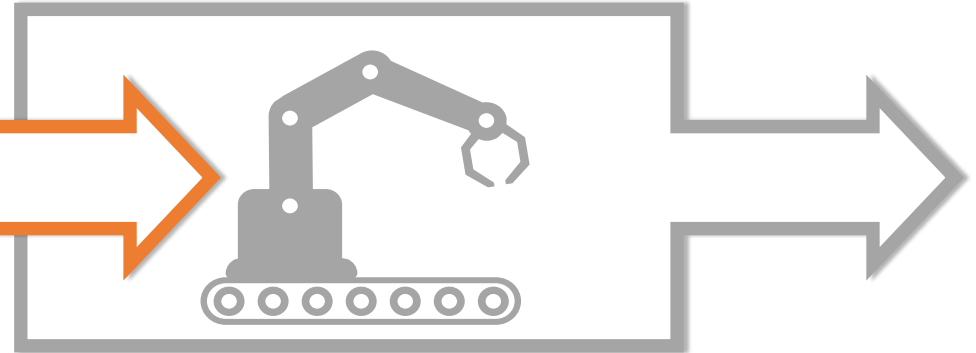
## Penanganan Perkara cerai



Meningkatkan kualitas penanganan perkara cerai yang berperspektif pada pemenuhan hak bagi perempuan dan anak

1. Penguatan kompetensi mediasi hakim
2. Penyusunan pedoman/buku saku penanganan perkara cerai
3. Penyusunan PERMA tentang penghitungan standar biaya hidup
4. Penyusunan RUU Perubahan UU Perkawinan
5. Adanya mekanisme pendampingan bagi anak dari peksos dan UPTD PPA

## Eksekusi Perkara Cerai terkait Nafkah Istri dan Anak



Meningkatkan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca putusan cerai melalui pelaksanaan eksekusi putusan yang efektif

1. Sinergi K/L
  - untuk koneksitas sistem dan data dalam upaya eksekusi nafkah
  - Penyusunan SOP dan prosedur pemotongan yang seragam di instansi pemerintah
  - Mekanisme pengawasan pelaksanaan eksekusi nafkah
2. RPP/Rperpres tentang pemenuhan hak dan nafkah anak
3. Pembentukan lembaga pemenuhan hak anak dan mantan istri pasca perceraian



# Interkoneksi Sistem Antar K/L Eksekusi Putusan Perkara Cerai Terkait Nafkah Istri dan Anak

## Kementerian Dalam Negeri

memblokir Nomor Induk Kependudukan (NIK) mantan suami

## Kementerian Hukum dan HAM

memblokir data paspor mantan suami

## Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

pemblokiran rekening mantan suami



## Kepolisian


pemblokiran pengurusan SKCK

## BPJS

BPJS dan layanan administrasi tingkat desa juga dapat melakukan pemblokiran akses

## K/L tempat suami bekerja

pemotongan gaji



**THE EXECUTION OF THE  
LAWS IS MORE  
IMPORTANT THAN THE  
MAKING OF THEM**

THOMAS JEFFERSON

---

PICTUREQUOTES.COM